

STRATEGI OPTIMALISASI ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN EFISIENSI BELANJA NEGARA “STUDI KASUS TAHUN ANGGARAN 2024–2025”

Nurita Verawati Hutapea
nuritahutapea91@gmail.com
Universitas Efarina Pematangsiantar

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tantangan kebijakan efisiensi belanja negara yang berdampak pada penurunan pagu anggaran BNN (Badan Narkotika Nasional), di tengah meningkatnya prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 2,11%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi anggaran yang diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di tengah kebijakan efisiensi fiskal nasional pada periode 2024-2025. Di tengah tantangan penurunan pagu anggaran sebesar 13,03% pada tahun 2024 dan kebijakan efisiensi mandiri sebesar Rp998 miliar pada tahun 2025, BNN dituntut untuk tetap menjalankan fungsi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) secara efektif. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka melalui dokumen laporan kinerja (LKjIP) dan regulasi anggaran terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN menerapkan strategi Smart Power melalui digitalisasi penyuluhan, prioritas pengawasan wilayah perbatasan, dan penguatan akuntabilitas keuangan. Optimalisasi ini terbukti efektif dengan tercapainya realisasi anggaran di atas 96% dan bertahannya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 15 tahun berturut-turut.

Kata Kunci: Optimalisasi Anggaran, BNN, P4GN, Efisiensi.

PENDAHULUAN

Kejahatan narkotika merupakan ancaman transnasional yang tergolong sebagai extraordinary crime, mengingat daya rusaknya yang menyasar ketahanan nasional dan generasi muda. Di Indonesia, berdasarkan data survei prevalensi, terdapat sekitar 2,11% atau setara dengan 4,15 juta penduduk yang terpapar penyalahgunaan narkotika. Sebagai garda terdepan, Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki tanggung jawab besar untuk menekan angka tersebut melalui mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Namun, dalam pelaksanaannya, BNN seringkali dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal. Dinamika ekonomi global dan nasional memicu pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan penyesuaian belanja negara. Memasuki tahun anggaran 2024, BNN mengalami kontraksi anggaran yang cukup signifikan, di mana pagu alokasi mengalami penurunan sebesar 13,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini diperberat pada tahun 2025 dengan adanya instruksi efisiensi mandiri sebesar Rp998 miliar.

Fenomena ini menimbulkan paradoks manajerial: di satu sisi, beban kerja P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) meningkat seiring dengan berkembangnya modus operandi Cyber Narcotism dan jaringan internasional, namun di sisi lain, dukungan finansial justru mengalami penyusutan. Oleh karena itu, langkah optimalisasi anggaran menjadi urgensi yang tidak dapat ditawar. Optimalisasi dalam konteks ini bukan sekadar pemotongan biaya (cost-cutting), melainkan upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi proses guna mencapai output maksimal dengan sumber daya yang terbatas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pemilihan metode ini didasari oleh kebutuhan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena optimalisasi anggaran di lingkungan BNN. Penelitian ini tidak hanya menyajikan angka, tetapi juga mengeksplorasi strategi manajerial di balik angka-angka tersebut untuk memahami pola optimalisasi yang paling efektif dalam mendukung program P4GN.

Penelitian ini dilakukan pada kurun waktu Januari hingga Februari 2026 dengan cakupan analisis berskala nasional pada satuan kerja BNN sebagai representasi kebijakan optimalisasi anggaran vertikal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Komparatif Pagu dan Realisasi Anggaran BNN (2023-2025)

Berdasarkan data yang dihimpun, BNN menunjukkan resiliensi fiskal yang signifikan. Meskipun pagu anggaran fluktuatif, tingkat penyerapan tetap konsisten di atas 96%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan anggaran BNN telah matang dalam menghadapi ketidakpastian fiskal.

Tabel 1. Perbandingan Pagu, Realisasi, dan Persentase Penyerapan Anggaran BNN

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Triliun Rp)	Realisasi Anggaran (Triliun Rp)	Persentase Penyerapan (%)	Keterangan Strategis
2023	1,82	1,76	96,70%	Basis operasional sebelum efisiensi nasional.
2024	1,58	1,52	96,13%	Terjadi penurunan pagu 13,03% dibanding 2023.
2025	3,21	3,11*	96,89%	Efisiensi mandiri sebesar Rp998 Miliar .
2026 (Usulan)	4,35	-	-	Usulan tambahan Rp1,14 T - Rp1,39 T.

**Angka estimasi berdasarkan realisasi berjalan/laporan terbaru Februari 2026.*

Analisis terhadap data tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan pagu sebesar 13,03%. Secara manajerial, penurunan ini disikapi dengan melakukan efisiensi pada belanja barang operasional dan perjalanan dinas yang tidak bersentuhan langsung dengan target output P4GN. Optimalisasi ini memungkinkan BNN tetap mencapai realisasi 96,13% yang menandakan bahwa program-program inti tetap berjalan meskipun ruang fiskal menyempit.

Fenomena Efisiensi Mandiri 2025: Tantangan dan Solusi

Tahun Anggaran 2025 menjadi titik krusial bagi manajemen operasional BNN. Munculnya kebijakan efisiensi belanja negara yang mengharuskan BNN melakukan self-blocking sebesar Rp998 miliar memaksa lembaga untuk melakukan penyisiran ulang terhadap seluruh komponen biaya.

Strategi optimalisasi yang diterapkan meliputi:

1. Prioritas Belanja Modal: BNN tetap mempertahankan anggaran untuk pengadaan alat intelijen dan teknologi pemindaian di wilayah perbatasan (entry point). Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa investasi teknologi adalah bentuk optimalisasi jangka panjang untuk menekan biaya operasional manual yang tinggi.

2. Rasionalisasi Belanja Barang: Memangkas biaya-biaya rapat fisik dan beralih ke koordinasi virtual. Penghematan dari sektor ini dialokasikan kembali untuk mendukung biaya rehabilitasi pecandu narkoba yang sifatnya mendesak (urgent).

Implementasi Strategi "Smart Power" sebagai Model Optimalisasi

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah transisi BNN menuju strategi Smart Power. Strategi ini merupakan bentuk nyata dari manajemen operasional yang efisien:

- Digitalisasi Pencegahan: Kampanye P4GN yang sebelumnya berbasis sosialisasi tatap muka (biaya tinggi, jangkauan terbatas) dioptimalkan melalui konten digital dan media sosial. Hasilnya, biaya per orang yang terpapar informasi pencegahan menurun drastis, namun jangkauan audiens meningkat secara eksponensial.
- Sinergi Lintas Sektor: BNN mengoptimalkan anggaran melalui kolaborasi dengan BAZNAS dan sektor swasta (CSR). Kolaborasi ini menutup celah anggaran negara dalam pembiayaan program kemandirian bagi mantan penyalahguna narkoba.

Akuntabilitas dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Optimalisasi anggaran di BNN tidak dilakukan dengan cara yang mencederai prinsip akuntansi pemerintah. Terpeliharanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 15 tahun berturut-turut hingga TA 2023 membuktikan bahwa efisiensi dilakukan secara transparan. Keberhasilan mempertahankan WTP di tengah pemangkasan anggaran menunjukkan bahwa sistem kontrol internal BNN tetap berjalan efektif dalam memitigasi risiko penyalahgunaan wewenang keuangan.

Analisis Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)

BNN terus mendorong peningkatan nilai IKPA sebagai parameter keberhasilan optimalisasi. Dengan fokus pada variabel ketepatan waktu tagihan dan perencanaan kas, BNN meminimalkan idle cash (dana menganggur) di bank. Hal ini sangat penting dalam manajemen keuangan publik untuk memastikan setiap rupiah bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat sejak awal tahun anggaran.

Tabel 2. Nilai IKPA BNN RI (Skala Nasional)

Tahun Anggaran	Nilai IKPA	Predikat	Keterangan Strategis
2024	97,16	Sangat Baik	Tercapai meski ada penurunan pagu 13,03%.
2025	98,20*	Sangat Baik	Berhasil menjaga kualitas di tengah efisiensi Rp998 M.

**Data estimasi berdasarkan laporan capaian akhir tahun yang dipaparkan dalam RDP DPR RI Februari 2026.*

1. Konsistensi Kualitas: Nilai IKPA 2024 sebesar 97,16 menunjukkan bahwa BNN sangat disiplin dalam perencanaan dan eksekusi anggaran. Dari total satker BNN, sebanyak 33 Satker bahkan meraih nilai sempurna (100).
2. Efisiensi Tanpa Penurunan Kinerja: Pada tahun 2025, meskipun BNN melakukan efisiensi mandiri yang besar, proyeksi nilai IKPA justru meningkat menjadi 98,20. Ini membuktikan bahwa kebijakan "penyisiran" anggaran non-prioritas berhasil meningkatkan efektivitas penggunaan dana pada komponen inti seperti Capaian Output dan Penyelesaian Tagihan. Nilai yang mendekati angka 100 ini adalah bukti valid bahwa optimalisasi anggaran yang dilakukan BNN bukanlah sekadar pemotongan dana, melainkan peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin utama mengenai optimalisasi anggaran di Badan Narkotika Nasional (BNN) periode 2023-2025:

1. Resiliensi terhadap Kontraksi Fiskal: BNN menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi penurunan pagu anggaran sebesar 13,03% pada tahun 2024 dan kebijakan efisiensi mandiri sebesar Rp998 miliar pada tahun 2025. Optimalisasi dilakukan bukan dengan pembatalan program, melainkan melalui restrukturisasi belanja operasional dan perjalanan dinas yang non-prioritas.
2. Efektivitas Strategi Smart Power: Implementasi teknologi digital dalam kampanye pencegahan (P4GN) terbukti menjadi instrumen optimalisasi yang sangat efektif. Hal ini ditunjukkan dengan capaian sebaran informasi digital yang melampaui target hingga 168%, sementara biaya operasional per unit mampu ditekan secara signifikan.
3. Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang Unggul: Optimalisasi yang dilakukan tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai IKPA sebesar 97,16 (2024) dan proyeksi 98,20 (2025) dengan predikat "Sangat Baik". Selain itu, konsistensi mempertahankan opini WTP selama 15 tahun berturut-turut mengonfirmasi bahwa efisiensi dilakukan tanpa mencederai tata kelola keuangan negara.
4. Capaian Output yang Melampaui Target: Meskipun ruang fiskal terbatas, indikator kinerja utama seperti Indeks Ketahanan Remaja dan penyelesaian berkas perkara (P-21) tetap tercapai di atas 100%. Ini membuktikan bahwa perencanaan anggaran berbasis skala prioritas wilayah rawan dan integrasi antar-sektor merupakan kunci keberhasilan manajemen operasional BNN.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143. Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional RI. (2024). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023/2024. Jakarta: BNN.
- Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN. (2025). Dari Data ke Aksi: BNN Perkuat Strategi Penanggulangan Narkotika Berbasis Riset Komprehensif. Diakses dari BNN.go.id.
- Badan Narkotika Nasional RI. (2025). Keputusan Kepala BNN Nomor 958 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya & Standar Komponen TA 2025. Jakarta : JDIH BNN. Diakses dari JDIH BNN.
- Rilis Pers BNN. (2026). Rapat Kerja BNN dengan Komisi III DPR RI terkait Capaian Kinerja 2025 dan Rencana Strategis 2026. [3 Februari 2026]. Diakses dari BNN.go.id.
- Kementerian Keuangan RI. (2011). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Reviu dan Optimalisasi Anggaran.
- Kementerian Keuangan RI. (2025). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025. Jakarta: JDIH Kemenkeu.
- Syamsurijal, C. A. (2025). Teori & Praktik Manajemen Keuangan Publik di Indonesia dalam Perspektif Sejarah Menghadapi Turbulensi Ekonomi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.